

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam proses menjalin hubungan yang baik dengan negara lain dibutuhkan sebuah aktivitas diplomasi yang cukup baik di antara negara. Bukan hanya hubungan yang baik yang tercipta namun, juga untuk membangun sebuah gambaran negara yang positif dimata masyarakat asing.¹ Diplomasi menjadi sebuah kajian di dalam ilmu hubungan internasional yang digunakan untuk melihat garis haluan yang diambil oleh sebuah negara. Bentuk pergeseran arah dunia membuat bentuk diplomasi yang awalnya cenderung konservatif seperti adanya negosiasi secara langsung di antara perwakilan negara, berubah menjadi diplomasi yang lebih kontemporer salah satunya dikenal dengan diplomasi publik. Secara sederhana diplomasi publik adalah aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah negara dengan memberikan sebuah pengaruh atau persepsi terhadap masyarakat dunia dengan mempromosikan kepentingan nasionalnya.²

Strategi persebaran nilai dan budaya yang ada di dalam diplomasi publik menjadikannya sebagai salah satu bentuk *soft power*, karena memiliki cara yang cenderung tidak koersif dalam menunjukkan kemampuan yang dimiliki. Secara definisi, *soft power* diartikan sebagai kemampuan sebuah negara dalam mempengaruhi pihak lain demi mencapai tujuan dan kepentingan nasional yang

¹ Shaun Riordan, "Dialogue-Based Public Diplomacy: A New Foreign Policy Paradigm?," *Studies in Diplomacy and International Relations*, 2005, 180–95, https://doi.org/10.1057/9780230554931_10.

² Riordan.

dimilikinya dengan cara persuasif seperti melalui nilai-nilai, budaya dan ideologi.³ Kemampuan *soft power* yang dimiliki oleh negara pada saat yang sama akan mempengaruhi kebijakan yang diambil oleh negara lain. Bentuk diplomasi publik memiliki peranan yang besar sebagai instrumen yang digunakan negara dalam mencapai kepentingannya, tanpa menggunakan kekuatan koersif seperti militer yang dapat saja menciptakan sebuah perselisihan. Selain dari pada itu pada saat yang sama diplomasi publik dapat menjadi jalan yang dilakukan oleh negara untuk dapat membentuk sebuah citra atau persepsi yang baik di mata masyarakat internasional terhadap negaranya.⁴

Diplomasi publik telah digunakan oleh berbagai negara demi mencapai kepentingan politik luar negerinya. Gaya diplomasi publik cenderung memiliki proses seperti *government to people* atau *people to people*. Dengan demikian proses diplomasi tidak selalu hanya dilakukan oleh aktor pemerintah secara resmi namun, dalam hal ini terdapat peran dari non-pemerintah di dalamnya seperti masyarakat sipil. Dalam hal ini diplomasi publik dapat menggunakan berbagai macam cara, salah satunya melalui sektor pendidikan. Pendidikan menjadi sebuah bentuk yang ideal untuk mengembangkan hubungan yang tahan lama dengan negara maupun publik asing. Terdapat banyak pendapat bahwa pendidikan menjadi jalan untuk menghasilkan sebuah masyarakat yang semakin terpelajar. Oleh karena itu proses mobilisasi pendidikan ke negara lain dipercaya akan memberikan sebuah

³ Joseph S. Nye, "Public Diplomacy and Soft Power," *Annals of the American Academy of Political and Social Science* 616, no. 1 (2008): 94–109, <https://doi.org/10.1177/0002716207311699>.

⁴ Jan Melissen, *The New Public Diplomacy: Between Theory and Practice, Studies in Diplomacy and International Relations*, 2005, https://doi.org/10.1057/9780230554931_1.

pengalaman dan pelajaran akan sebuah budaya baru, sehingga menciptakan sebuah *mutual understanding* dalam masyarakat. Selain itu, adanya mobilitas pelajar dipandang sebagai cara yang produktif untuk mengembangkan hubungan geopolitik dan hubungan yang lebih erat, terutama di tingkat regional dimana negara-negara mencapai aliansi ekonomi dan politik yang lebih kuat dengan negara-negara tetangga melalui kegiatan pendidikan internasional.⁵

Bagi negara besar seperti Australia praktik diplomasi menjadi sarana untuk membangun sebuah pengertian dan pemahaman mengenai bagaimana negara lain memandang Australia. Sebuah kebijakan luar negeri akan selalu mencerminkan nilai-nilai seperti apa yang dianut oleh sebuah negara. Hal yang sama pun juga dapat dilihat dalam kebijakan luar negeri Australia. Proses pembentukan kebijakan luar negeri Australia didasarkan kepada nilai-nilai yang dipahami di dalam masyarakat, karena pada dasarnya identitas Australia tidak didasari kepada agama maupun ras tertentu namun melalui nilai-nilai dan kebebasan bernegara yang terbentuk di dalam kehidupan bermasyarakat.⁶ Australia memiliki infrastruktur dan standar pendidikan yang cukup tinggi secara internasional dengan fasilitas yang mumpuni dan tenaga pengajar yang cukup berkualitas. Kualitas pendidikan yang tinggi membuat Australia menjadi negara yang memiliki tingkat kesejahteraan dan pendidikan yang baik. Sehingga, sumber daya manusia yang dimiliki oleh Australia berada dalam tingkat kesejahteraan yang tinggi. Australia juga dikenal sebagai

⁵ Jane Knight, "Internationalization Remodeled: Definition, Approaches, and Rationales," *Journal of Studies in International Education* 8, no. 1 (March 13, 2004): 5–31, <https://doi.org/10.1177/1028315303260832>.

⁶ White Paper, "Opportunity Security Strength," *2017 Foreign Policy White Paper*, 2017, <https://www.fpwhitepaper.gov.au/>.

benua Australia yang bersebelahan dengan kawasan Asia dengan populasi yang didominasi oleh penduduk berkulit putih dengan kebudayaannya tersendiri.

Letak geografis Australia sendiri berada dekat dengan Asia, kondisi geografis ini memberikan sebuah pengaruh yang cukup nyata yang mengharuskan Australia untuk beradaptasi dengan stabilitas politik Asia. Kesadaran letak geografis ini membuat Australia berusaha untuk menciptakan hubungan luar negeri di kawasan Asia-Pasifik karena pada saat yang sama kondisi kesejahteraan juga bergantung terhadap derajat stabilitas politik dan kesejahteraan yang ada di Asia. Pada tahun 2013, menteri luar negeri pada saat itu yaitu Julie Bishop mengusulkan sebuah program yang dikenal dengan “*The New Colombo Plan*” yang merupakan lanjutan dari program sebelumnya yaitu “*The Colombo Plan*”. Program “*The New Colombo Plan*” dibentuk dengan memfokuskan ke dalam program mobilitas pelajar, untuk meningkatkan keterlibatan regional di kawasan Asia-Pasifik sebagai inisiatif kebijakan luar negeri Australia.⁷ *New Colombo Plan* sendiri bertujuan untuk memperluas dan juga memperdalam keterlibatan Australia di kawasan samudra Hindia-Asia Pasifik dengan mengirimkan mahasiswa Australia yang memiliki kemampuan akademik yang baik untuk dapat belajar dan bekerja di kawasan Asia-Pasifik.

Mobilisasi pelajar dalam Program *New Colombo Plan* menjadi sebuah *soft power* yang digunakan oleh Australia untuk membawa kepentingannya khususnya

⁷ Caitlin Byrne, “Australia’s New Colombo Plan: Enhancing Regional Soft Power through Student Mobility,” *International Journal* 71, no. 1 (2016): 107–28, <https://doi.org/10.1177/0020702015617786>.

di kawasan Asia Pasifik.⁸ Kekuatan *soft power* ini tentunya didukung dengan diplomasi publik yang memiliki kerangka kerja yang tepat sehingga secara tepat membawa kebijakan Australia di seluruh kawasan. Praktik diplomasi publik melalui pemberian beasiswa pendidikan ke luar negeri merupakan sebuah komponen penting dalam diplomasi publik untuk mencapai hasil dalam jangka panjang dengan model diplomasi relasional atau antar pribadi.⁹ Dengan demikian, bukan hanya aktor negara saja yang memainkan peran dalam diplomasi publik namun aktor non-negara seperti masyarakat sipil pun dapat andil dalam mengelola hubungan, mempengaruhi pikiran dan mendukung nilai-nilai yang dimiliki oleh sebuah negara.¹⁰ Diplomasi publik membutuhkan sebuah keterlibatan dari masyarakat internasional dan juga domestik sehingga dapat menjadi lebih efektif sehingga tercipta sebuah proses interaksi seperti dialog di dalamnya.

Dalam bentuknya program *New Colombo Plan* memiliki beberapa program campuran berbasis pendidikan, informasi dan budaya. Pada dasarnya *New Colombo Plan* menempatkan nilai strategis yang melibatkan antara masyarakat yang dijalin melalui pengalaman pendidikan di luar negeri. Program ini diharapkan untuk dapat menghasilkan sebuah pengalaman, wawasan, persahabatan yang terjalin melalui *New Colombo Plan* baik dalam tingkat individu dan institusional

⁸ Caitlin Byrne and Rebecca Hall, "Realising Australia's International Education as Public Diplomacy," *Australian Journal of International Affairs* 67, no. 4 (2013): 419–38, <https://doi.org/10.1080/10357718.2013.806019>.

⁹ Guy J. Golan, "An Integrated Approach to Public Diplomacy," *American Behavioral Scientist* 57, no. 9 (September 10, 2013): 1251–55, <https://doi.org/10.1177/0002764213487711>.

¹⁰ Bruce Gregory, "American Public Diplomacy: Enduring Characteristics, Elusive Transformation," *The Hague Journal of Diplomacy* 6, no. 3–4 (2011): 351–72, <https://doi.org/10.1163/187119111X583941>.

yang memberikan peluang baru untuk saling mengerti, percaya dan berkolaborasi di antara negara.¹¹ Program *New Colombo Plan* yang dijalankan oleh Australia dengan menempatkan mahasiswa Australia menjadi komponen penting dalam diplomasi publik, untuk memelihara hubungan negeri Australia dengan negara-negara yang ada di kawasan.

Program *New Colombo Plan* menjadi mekanisme diplomasi publik Australia yang bukan hanya sekedar program mobilitas mahasiswa. Sebaliknya pemerintah Australia sendiri secara berturut-turut telah mempromosikan program mobilitas mahasiswa ke luar Australia. *New Colombo Plan* dijalankan di bawah *Department of Foreign Affairs and Trade* (DFAT) dan secara eksplisit menjadi tujuan kebijakan luar negeri Australia.¹² Kebijakan *New Colombo Plan* sendiri telah menyediakan sebuah wadah untuk bagi Australia untuk dapat ikut serta ke dalam ruang lingkup regional samudra Hindia-Asia atau Asia-Pasifik. Perluasan yang dilakukan oleh Australia ini tentu cukup jelas dengan untuk tetap membawa kepentingan Australia ke kawasan Asia-Pasifik.

Dalam penerapannya *New Colombo Plan* memiliki pendekatan *people-to-people diplomacy* untuk mendukung upaya membangun hubungan kelembagaan dan hubungan antar masyarakat di Asia-Pasifik. Diplomasi ini dapat dikatakan lebih fleksibel dibandingkan dengan beberapa bentuk diplomasi lainnya karena proses pertemuan tidak selalu berbentuk formal. Bentuk *people-to-people diplomacy*

¹¹ Byrne, "Australia's New Colombo Plan: Enhancing Regional Soft Power through Student Mobility."

¹² Ly Tran and Mark Rahimi, "New Colombo Plan: A Review of Research and Implications for Practice," no. October (2018): 17, <https://www.icaa.org.au/documents/item/1448>.

sering kali menjadi sebuah langkah yang diambil oleh negara karena memiliki berbentuk pertemuan yang tidak resmi, dengan melibatkan masyarakat, sehingga hubungan antara negara dapat dipelihara dengan baik. Masyarakat memegang peran yang penting dalam hal berinteraksi, proses interaksi antar masyarakat ini di manfaat kan oleh negara untuk memberikan dampak yang signifikan dan luas terhadap publik internasional. Pertukaran informasi yang terjadi di antara manusia melalui interaksi baik langsung atau melalui media pendukung lainnya menghasilkan pertukaran pemikiran, nilai dan pandangan diantara individu. Selain itu, proses interaksi yang cukup intensif tentunya akan menghasilkan sebuah persebaran nilai dan pandangan.

Program mobilitas mahasiswa melalui beasiswa telah muncul sebagai salah satu alat penting yang digunakan oleh pemerintah dalam diplomasi publik dan kegiatan hubungan internasional.¹³ Dalam hal ini pemanfaatan mobilitas pelajar akan mendukung kebijakan luar negeri Australia khususnya untuk menjaga relasi dengan negara-negara kawasan Asia-Pasifik. Kawasan Asia-Pasifik sendiri membentang dari Asia timur hingga kepulauan Pasifik, yang secara kawasan dikenal sebagai kawasan yang cukup dinamis baik secara ekonomi maupun kawasan. Sehingga tidak bisa dipungkiri kawasan ini memiliki sebuah kompleksitas

¹³ Hacer ATABAŞ and Mehmet KÖSE, "The Role of Foreign Policy in International Student Mobility: The Case of the Turkish 'Opening to Africa' Policy," *Üniversite Araştırmaları Dergisi* 6, no. 4 (December 20, 2023): 367–80, <https://doi.org/10.32329/uad.1334643>.

geopolitik, dinamika kerja sama dan persaingan yang berdampak pada stabilitas, regional, hubungan perdagangan dan strategi keamanan.¹⁴

Dalam kebijakan luar negeri Australia, pendidikan internasional menjadi bagian yang penting terlebih dalam kehadirannya dengan kawasan di sekitarnya yaitu Asia-Pasifik untuk mempromosikan agenda kebijakannya. Selain memberikan manfaat bagi individu adanya mobilitas mahasiswa dapat memberikan kontribusi terhadap sumber daya manusia dan meningkatkan hubungan diplomatik. Mobilitas mahasiswa Australia keluar negeri dapat dianggap sebagai sebuah inisiatif kebijakan luar negeri yang penting untuk bisa meningkatkan relasi di negara-negara tujuan di kawasan Asia-Pasifik. Praktik diplomasi publik menjadi sebuah langkah yang diambil oleh sebuah negara untuk dapat menjangkau hubungan yang lebih luas. Dengan itu penelitian ini akan mengkaji lebih lanjut terhadap program *The New Colombo Plan* dalam mendukung kepentingan nasional Australia dengan menggunakan mobilisasi pelajar sebagai alat utama dalam program ini. Diplomasi melalui mobilisasi manusia dan pendidikan sangat penting dalam sebuah negara, hal ini dimanfaatkan oleh pemerintah Australia untuk kepentingan nasionalnya di kawasan Asia-Pasifik.

Secara akademis penelitian ini akan membantu dalam hal menunjukkan perspektif dan temuan-temuan yang baru yang nantinya dapat digunakan dalam bidang akademis. Sehingga penelitian dapat membantu dalam hal meningkatkan

¹⁴ Rodon Pedrason, "Indo-Pasifik Dalam Perspektif Geopolitik Dan Geostrategi," *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)* 7, no. 1 (June 30, 2021): 88–95, <https://doi.org/10.29210/02021830>.

pengetahuan dan mendapatkan jawaban atas sebuah fenomena yang sedang terjadi dalam tatanan internasional. Agar supaya hasil yang didapatkan dalam penelitian ini dapat memberikan pengembangan dalam bidang ilmu hubungan internasional.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini terdapat beberapa bagian yang kemudian akan dijadikan sebagai fokus oleh penulis sekaligus menjadi batasan dalam penelitian ini. Bagian yang menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu: *Pertama*, diplomasi publik Australia melalui *New Colombo Plan*. *Kedua*, implementasi *New Colombo Plan* di kawasan Asia Pasifik. *Ketiga*, Kontribusi *New Colombo Plan* terhadap kepentingan nasional Australia. Sehingga berdasarkan batasan dan fokus yang telah diberikan penulis merumuskan pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana program *New Colombo Plan* Australia berkontribusi terhadap kepentingan nasional Australia di kawasan Asia-Pasifik?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menggambarkan dan mengkaji program *New Colombo Plan* sebagai diplomasi publik Australia dalam mendukung kepentingan nasionalnya di kawasan Asia-Pasifik. Selain itu, penelitian ini akan melihat secara mendalam mengenai pentingnya mobilitas pelajar melalui *New Colombo Plan* dalam mendukung kebijakan luar negeri Australia. Sehingga melalui

penelitian ini diharapkan membantu menambah wawasan dan memberikan gambaran kepada pembaca dan juga para pengkaji ilmu hubungan internasional mengenai program *New Colombo Plan* Australia. Sehingga penulis berharap penelitian ini dapat menunjukkan relevansi dan mengidentifikasi bagaimana program *New Colombo Plan* dapat mendukung kepentingan nasional Australia di kawasan Asia-Pasifik.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini akan terfokus ke dalam bagaimana *New Colombo Plan* dapat mendukung kepentingan nasional Australia di kawasan Asia-Pasifik. Dalam penelitian ini penulis ingin memberikan sebuah kontribusi baik secara praktis maupun akademis sehingga dapat memberikan manfaat dan signifikansi yang nyata. Bagi penulis penelitian ini dapat memberikan sebuah signifikansi yang dapat bermanfaat secara bidang akademis. Hal ini terkhusus kepada para pihak yang secara mendalam mengkaji mengenai diplomasi publik dan kebijakan luar negeri Australia.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini memiliki lima bab dan setiap bab memiliki tujuannya tersendiri yang dijabarkan sebagai berikut

BAB I : Bagian ini berisi pendahuluan yang perlu diketahui oleh pembaca sebelum membaca penelitian ini yang terdiri dari latar belakang, pertanyaan

penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, untuk memberikan gambaran dan informasi mengenai topik yang akan dibahas dalam penelitian ini.

BAB II : Dalam bagian ini merupakan kerangka teoritis yang berisi dua bagian yaitu tinjauan pustaka dan teori dan konsep. Tinjauan pustaka berfungsi untuk menunjukkan informasi mengenai diskusi akademis yang akan di gunakan penulis untuk membantu dalam mengkaji penelitian terdahulu. Dalam teori dan konsep penulis menggunakan teori liberalisme sebagai teori hi yang akan di gunakan untuk menjelaskan penelitian ini beserta dengan konsep untuk menjawab pertanyaan penelitian.

BAB III : Dalam bagian ini merupakan metodologi yang akan menguraikan mengenai pendekatan penelitian, metode penelitian, teknik pengumpulan data dalam proses penulisan penelitian.

BAB IV : Dalam bagian ini akan menjadi fokus utama dalam penelitian ini dengan menganalisa data yang telah dikumpulkan. Penulis akan mengulas program *New Colombo Plan* Australia dalam meningkatkan kepentingannya di kawasan Asia-Pasifik.

BAB V : Dalam bagian ini berisi kesimpulan dari hasil analisis yang sudah dilakukan sebelumnya. Selain itu penulis juga memberikan saran bagi penelitian selanjutnya.

Demikian pembahasan bab pendahuluan yang membahas mengenai garis besar dalam penelitian ini dimulai dari latar belakang, perumusan masalah dan

tujuan dan manfaat. Dalam bab berikutnya penulis akan mengevaluasi kajian literatur dan pandangan dari para ahli dengan menggunakan teori dan konsep yang akan menjadi landasan analisis dalam penelitian ini.

